Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau

Mahyudin¹, Nastia², L.M. Azhar Sa'ban³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Email: izharrazi@gmail.com

Abstract. *That there are several factors that become obstacles in implementing restaurant tax collection. These factors are internal factors and external factors. This research uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this research are 1) The development of total Baubau City restaurant tax revenue in the 2017-2020 period was in 2017 which was 1.50 and decreased in 2018 which was 1.18. In 2019, there was an increase of 1.41. Based on the effectiveness criteria used, it shows that the restaurant tax revenue in Baubau City is classified as effective, 2) The restaurant tax contribution to local revenue is quite small. This can be seen that starting in 2017 the contribution was 0.03%, the contribution of restaurant tax to PAD increased in 2018 by 0.05% but then the contribution of restaurant tax to PAD in 2019 decreased again by 0.04%, 3) Factors that hinder the effectiveness of restaurant tax revenue are Internal Factors, namely factors from within the Financial Management Agency, Regional Assets and Revenue itself and external factors that come from outside the Regional Financial, Asset and Income Management Agency.*

Keywords: *Effectiveness, Restaurant Tax, Local Revenue*

Abstrak. Bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan dalam pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Perkembangan dari total penerimaan pajak restoran Kota Baubau dalam kurun waktu 2017-2020 adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,50 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,18. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,41. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif, 2) Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah termasuk cukup kecil. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,03%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,05% tetapi kemudian kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%, 3) Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan pajak restoran adalah Faktor Internal yaitu faktor dari dalam Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah itu sendiri dan Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah (Pratama et al., 2016). Pajak adalah wajib. Kewajiban pajak menurut undang-undang dapat dipaksakan dan terdapat sanksi hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang yang telah ditentukan. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan asli daerah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Pratama et al., 2016).

Kota Baubau adalah sebuah kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kota Baubau adalah daerah otonomi, memperoleh status kota pada tanggal 21 Juni 2001. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan daerah. BPKAPD Kota Baubau berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama

pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Selain itu BPKAPD ini bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa BPKAPD merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalan sumber daya alam yang harus di kembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarannya (Lohonauman, 2016). Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126).

Salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berwulo et al., 2017). Menurut Siahaan (2005) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah menurut Undang- Undang No.28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Nusa et al., 2015). Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengenai sumber pendapatan daerah diatur dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: 1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 1) pendapatan asli Daerah meliputi: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 2) pendapatan transfer; dan 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Menurut data dari BPKAD Kota Baubau selama tiga tahun terakhir, target dan realisasi dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Baubau (2017-2019)

Tahun	Pajak Daerah	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	17.905.000.000,00	36.177.482.751,00
2018	17.975.000.000,00	23.254.405.458,00

2019	17.975.000.000,00	25.084.876.636,00
------	-------------------	-------------------

Sumber: BPKAPD Kota Baubau

Penerimaan pajak yang dikelola Kantor BPKAPD Kota BauBau khususnya bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari tujuh jenis pajak yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 8) Pajak Bea perolehan atas tanah dan bangunan serta parkir (BPHTB).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran (laili khuriyah, sri mangesti rahayu, 2014). Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran, pada pasal 1 (6) disebutkan bahwa Pajak Restoran selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Restoran. Pajak Restoran selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pasal 1 (7) Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. (8) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Berdasarkan pemungutannya dasar pengenaan pajak restoran ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Besarnya tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pemungut pajak itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor internal seperti: a) Keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai, hal ini bisa dilihat dari jumlah petugas pemungut aktif yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah yaitu berjumlah 5 personil yang membawahi beberapa jenis Pajak Daerah; b) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, yang diberikan masih hanya sebatas sanksi administratif, itupun belum terlaksana secara maksimal; 3) Kurang disiplinnya para petugas dalam menghimpun pajak restoran, hal ini dapat diketahui dari pajak yang disetorkan, malahan seringkali menunda pembayaran pajak yang sudah terhimpun.

Faktor Eksternal adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup kantor, dalam hal ini masalah yang muncul dilapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak, yaitu: a) tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Karena kebanyakan dari mereka tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahnya, hal seperti inilah yang menjadi problematika dilapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya; b) penetapan pajak yang terutang

bukan berdasarkan atas dasar pengenaan pajak yang tertuang dalam Perda, namun menggunakan kesepakatan atau negosiasi antara pemungut pajak dengan wajib pajak itu sendiri.

Hal tersebut tidak sebanding dengan omzet yang didapat dari jumlah pembayaran pengunjung, sehingga pajak yang dipungutpun kurang berpotensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Baubau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pajak restoran di Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dalam pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik.

Menurut Sugiyono (2015:15) untuk pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan ciri khusus yang sesuai tujuan penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Efektivitas pajak restoran, 2) Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. Hal ini mempertimbangkan bahwa Kota Baubau memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus sehingga dapat meningkatkan jumlah restoran sebagai salah satu pendukung sektor pariwisata di Kota Baubau. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Analisis Rasio

Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran sendiri digunakan analisis rasio (Dhinariyati, 2003)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}}$$

Kriteria pengujian:

Efektivitas < 1 maka pajak restoran tidak efektif

Efektivitas > 1 maka pajak restoran efektif

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak restoran dari semua potensi pajak restoran dengan anggapan semua wajib pajak restoran membayar pajak. Namun demikian, mengingat sulitnya menentukan besarnya potensi pajak restoran, maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah besarnya target pajak restoran.

2. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut : (Abdul Halim, 2004)

$$\frac{x}{y} \times 100\% \text{ dan } \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan:

X : realisasi penerimaan pajak restoran

Y : realisasi penerimaan pajak daerah

Z : realisasi penerimaan PAD

3. Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti.
4. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti.
5. Indentifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran

Mahmudi (2010), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi	Perkembangan Realisasi %
2017	2.300.000.000,00	3.457.768.539,00	1,50 %
2018	3.000.000.000,00	3.566.059.944,00	1,18%
2019	3.000.000.000,00	4.241.409.137,00	1,41%

Sumber: olah data

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Kantor BPKAPD Kota Baubau dalam merealisasikan Pendapatan Pajak Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi pendapatan. Pajak restoran dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- a. Efektivitas < 1 maka pajak restoran tidak efektif
- b. Efektivitas > 1 maka pajak restoran efektif

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}}$$

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2017 yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 3.457.768.539}}{\text{Rp. 2.300.000.000}}$$

2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2018 yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 3.566.059.944}}{\text{Rp. 3.000.000.000}}$$

3. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2019 yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 4.241.409.137}}{\text{Rp. 3.000.000.000}}$$

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
-------	----------------------------	----------------	-------------

2017	2.300.000.000,00	3.457.768.539,00	1,50
2018	3.000.000.000,00	3.566.059.944,00	1,18
2019	3.000.000.000,00	4.241.409.137,00	1,41

Sumber: olah data

Dari tabel diatas diketahui bahwa perkembangan dari total penerimaan pajak restoran Kota Baubau dalam kurun waktu 2017-2020 adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,50 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,18. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,41. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif.

Kontribusi Pajak Restoran

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagihasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut : (Abdul Halim, 2004)

$$\frac{X}{Y} \times 100\% \text{ dan } \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X : realisasi penerimaan pajak restoran

Y : realisasi penerimaan pajak daerah

Z : realisasi penerimaan PAD

1. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau

Pajak Restoran merupakan salah satu Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Baubau karena dengan adanya pajak tersebut akan dapat memberikan tambahan pendapatan yaitu melalui pungutan di rumah makan yang ada di kota Baubau.

a. Kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau tahun 2017

$$\frac{\text{Rp. 3.457.768.539}}{\text{Rp. 36.177.482.751}} \times 100\% = 0,09\%$$

b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau tahun 2018

$$\frac{\text{Rp. 3.566.059.944}}{\text{Rp. 23.254.405.458}} \times 100\% = 0,15\%$$

c. Kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau tahun 2019

$$\frac{\text{Rp. 4.241.409.137}}{\text{Rp. 25.084.876.636}} \times 100\% = 0,16\%$$

Tingkat Efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2017-2019 dapat diketahui dibandingkan dengan targetnya selama kurun waktu 3 tahun sudah efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik dalam pencapaian penerimaan pajak restoran. Namun perbandingan tingkat efektif pajak restoran dari tahun 2017 sebesar 1,50% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar

1,18%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,41%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak restoran melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Baubau

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah
2017	3.457.768.539,00	36.177.482.751,00	0,09%
2018	3.566.059.944,00	23.254.405.458,00	0,15%
2019	4.241.409.137,00	25.084.876.636,00	0,16%

Sumber: olah data

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di kota Baubau selama tiga tahun dari 2017 sampai 2019 secara umum mengalami kenaikan, pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,09% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2018 Pajak Restoran juga memberikan kontribusi sebesar 0,15% kemudian pada tahun 2019 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 0,16%.

2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau

a. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2017

$$\frac{\text{Rp. 3.457.768.539}}{\text{Rp. 106.249.590.521}} \times 100\% = 0,03\%$$

Rp. 106.249.590.521

b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2018

$$\frac{\text{Rp. 3.566.059.944}}{\text{Rp. 67.220.777.535}} \times 100\% = 0,05\%$$

Rp. 67.220.777.535

c. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2019

$$\frac{\text{Rp. 4.241.409.137}}{\text{Rp. 85.973.488.944}} \times 100\% = 0,04\%$$

Rp. 85.973.488.944

Perkembangan yang terbesar dari total penerimaan pajak restoran dari total realisasi penerimaan pajak restoran Kota Baubau dalam kurun waktu 2017-2019 terjadi pada tahun 2019.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Baubau

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi PAD
2017	3.457.768.539,00	106.249.590.521,00	0,03%
2018	3.566.059.944,00	67.220.777.535,00	0,05%
2019	4.241.409.137,00	85.973.488.944,00	0,04%

Sumber: olah data

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk cukup kecil. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,03%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,05% tetapi kemudian kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%. Walaupun, pajak restoran memiliki prosentase sumbangan terkecil dibandingkan dengan penerimaan yang lain tetapi pajak restoran juga mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah BPKAPD Kota Baubau belum berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor, sehingga tanpa disadari faktor-faktor tersebut ikut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Baubau, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal yaitu faktor dari dalam Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah itu sendiri yaitu:
 - a) Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Baubau, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Baubau.
 - b) Kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan, bahkan terkadang tidak membayar tarif pajak yang sudah ditentukan.

Dari hasil penelitian bahwa BPKAPD harus meningkatkan pengawasan pada restoran atau warung makan, agar pembeli selalu memberikan pajak 10% agar penerimaan pajak restoran meningkat.

2. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah, antara lain:

Wajib pajak belum mengetahui arti penting pajak, sehingga wajib pajak enggan membayar pajaknya kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Ini dikarenakan Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut. Belum tegas didalam pemberian sanksi, bahkan dalam artinya hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum di terapkan secara optimal, sehingga wajib pajak tidak diberikan sanksi.

Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau sebagai kantor yang diberikan wewenang menangani masalah pajak restoran harus lebih tegas menyikapi restoran atau warung makan yang melakukan pelanggaran. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam hal ini pembayaran yang dia lakukan tidak sesuai dengan pendapatan atau omzet penjualan yang diperoleh ke Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau ini menyebabkan menurunnya omzet pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah terhadap pajak restoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau, efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun pengamatan 2017-2019, berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan,

menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 3 tahun lebih dari 1%.

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Baubau selama tiga tahun dari 2017-2019 secara umum mengalami kenaikan, pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,09% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2018 Pajak Restoran juga memberikan kontribusi sebesar 0,15% kemudian pada tahun 2019 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap pendapatan pajak daerah Kota Baubau.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk cukup kecil. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,03%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,05% tetapi kemudian kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Baubau yaitu Faktor Internal Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Baubau, Kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, dan Faktor eksternal minimnya kesadaran wajib pajak, belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, serta belum tegas Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau didalam pemberian sanksi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, Daerah Manajemen Keuangan, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33.
- Dhinaryati, 2003, Analisis Efektifitas dan Efisiensi PAD di Era Otonomi Daerah Kota Surakarta, Skripsi, Surakarta.
- Laili khuriyah, sri mangesti rahayu, muhammad saifi. (2014). UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun Anggaran 2009-2013). *Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, 14(2), 1–10. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/584>
- Lohonauman, I. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Situro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 172–180.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2015). Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1–17.
- Pratama, R., Saifi, M., & ZA, Z. (2016). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 30(1), 17–27.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yuliartini, P. I., & Supadmi, N. L. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 489–502.